

**ANALISIS HUKUM TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI POLRI  
DALAM MENGHADAPI UNJUK RASA MASYARAKAT  
DI KABUPATEN MUARA ENIM**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**REGGY PERMANA SUKATENDEL  
011900112**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAAH PEMUDA  
2023**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : REGGY PERMANA SUKATENDEL  
NIM : 011900112  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI  
POLRI DALAM MENGHADAPI UNJUK RASA  
MASYARAKAT DI KABUPATEN MUARA ENIM

Palembang, Mei 2023



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH



Pembimbing Pertama,

Dr. Hj. RIANDA RIVIYUSNITA, SH,M.Kn

Pembimbing Kedua,

LIZA DESHAINI, SH,M.Hum

# ANALISIS HUKUM TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI POLRI DALAM MENGHADAPI UNJUK RASA MASYARAKAT DI KABUPATEN MUARA ENIM

**Penulis,**  
REGGY PERMANA SUKATENDEL  
011900112

**Pembimbing Pertama,**  
Dr.Hj.RIANDA RIVIYUSNITA, SH., MKN.  
**Pembimbing Kedua,**  
LIZA DESHAINI, SH., M.Hum.

## ABSTRAK

Membubarkan atau melarang demonstran saat melakukan unjuk rasa yang dilakukan pihak Kepolisian adalah semata-mata bukan bermaksud untuk membatasi hak-hak para demonstran dalam menyampaikan pendapat dimuka umum, melainkan sikap para demonstran yang anarkis yang menimbulkan kekerasan dan kerugian baik moril maupun materil, menggunakan metodologi penelitian penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data di titik beratkan pada penelitian kepustakaan dengan mendiagnosa bahan - bahan hukum primer berupa asas – asas, dan kaidah hukum, dan sekunder terdiri atas buku – buku hukum (*Textbook*), dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan internet, dengan tidak lupa menyebut sumbernya dan situsnya.

Simpulan, Kepolisian Resort (Polres) di tingkat Kabupaten/kota. Bentuk penanganan aksi unjuk rasa oleh kepolisian Kabupaten Mura Enim yaitu dibutuhkan adanya kordinasi yang intensif antara pihak pemerintah daerah dan pihak kepolisian agar dapat menjaga ketertiban dan keamanan unjuk rasa yang terjadi, demikian pula sosialisasi aturan yang menyangkut unjuk rasa dalam arti menyampaikan pendapat di muka umum sesuai aturan perundangan yang berlaku. Upaya represif dan preventif polri dalam menghadapi unjuk rasa masyarakat, Tindakan Represif Polri, Menyemprotkan *water cannon* dan gas air mata, memukul menggunakan tongkat atau senjata tumpul, menembak menggunakan peluru tajam. Upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan pihak Kepolisian dalam melakukan tugas sesuai dengan Prosedur tetap (Protap).

Kata kunci : Analisis Hukum, Polri, Unjuk Rasa.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI .....	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan .....	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Ruang Lingkup Penelitian .....	6
E. Metodologi Penelitian.....	7
F. Definisi Oprasional .....	8
G. Sistematika Penulisan .....	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana .....	12
B. Perlindungan Hak Asasi Manusia Dan Kebebasan Di Muka Umum .....	17
C. Pengertian Unjuk Rasa.....	22
D. Kode Etik Kepolisian Di Indonesia.....	28
BAB III. ANALISIS HUKUM TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI POLRI DALAM MENGHADAPI UNJUK RASA MASYARAKAT DI KABUPATEN MUARA ENIM	
A. Analisis Hukum Terhadap Tugas Dan Fungsi Polri Dalam Menghadapi Unjuk Rasa Masyarakat Di Kabupaten Muara Enim.....	33
B. Upaya Reprensif Dan Preventif Polri Dalam Menghadapi Unjuk Rasa Masyarakat.....	39
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	44
B. Saran .....	45
DAFTAR PUSTAKA.....	46
LAMPIRAN .....	

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Analisis hukum terhadap tugas dan fungsi polri dalam menghadapi unjuk rasa masyarakat di kabupaten muara enim, pelaksanaan koordinasi antara Kepolisian daerah (Polda) tingkat Provinsi, dengan Kepolisian Resort (Polres) di tingkat Kabupaten/kota. Bentuk penanganan aksi unjuk rasa oleh kepolisian Kabupaten Mura Enim yaitu dibutuhkan adanya kordinasi yang intensif antara pihak pemerintah daerah dan pihak kepolisian agar dapat menjaga ketertiban dan keamanan unjuk rasa yang terjadi, demikian pula sosialisasi aturan yang menyangkut unjuk rasa dalam arti menyampaikan pendapat di muka umum sesuai aturan perundangan yang berlaku.
4. Upaya represif dan preventif polri dalam menghadapi unjuk rasa masyarakat, Tindakan Represif Polri, Menyemprotkan *water cannon* dan gas air mata, memukul menggunakan tongkat atau senjata tumpul, menembak menggunakan peluru tajam. Upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan pihak Kepolisian dalam melakukan tugas sesuai dengan Prosedur tetap (Protap).

## DAFTAR PUSTAKA



Puku

- Agus Budi Purnomo, dkk. *Peta Konflik Jakarta, Seri VIII: Resolusi Konflik*. Yappika, Jakarta. 2004.
- Ahmad Faizur Rosyad, "Mengenal Alam Suci : Menapak Jejak Al-Ghozali Tasawu, Filsafat dan Tradisi", Kutub, Yogyakarta, 2004.
- Ahmad Sarwat, *Fiqih Politik*, DU CENTER. Jakarta. 2010.
- Ali Imron, "Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah", Bumi Aksara, Jakarta, 2012.
- Ali A. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang. Legisprudence*. Jakarta. 2012.
- Arbi Sanit, *Mahasiswa, kekuasaan dan Bangsa*. lingkaran Studi Mahasiswa, Jakrta. 1989.
- Hasse J, *Anarkisme Demonstrasi Mahasiswa: Studi Kasus Pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*. Pascasarjana UGM, Jogjakarta. 2004.
- M. Sholihin, dkk, "Akhlaq Tasawuf : Mamusia Etika dan Makna Hidup", Penerbit Nuansa, Bandung, 2003.
- Ma'arif A.S. *Politik Demokrasi Di Indonesia*. Gramedia. Jakarta. 2008.
- Mahmud Mulyadi, *Kepolisian dalam sistem peradilan pidana*, USU Press, Medan. 2009.
- Pudi Rahardi, "Hukum Kepolisian (Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi POLRI)", Laksbang Grafika, Surabaya, 2014.
- Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Yustisia. Yogyakarta. 2013.
- Wawan Tunggul Alam, "Memahami Profesi Hukum : Hakim, Jaksa, Polisi, Notaris, Advokat dan Konsultan Hukum Pasar Modal", Milenia Populer, Jakarta. 2004.